



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	A. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Menteri Perdagangan RI, 2. Menteri Perindustrian RI, 3. Menteri Koperasi dan UKM, 4. Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan Surat Presiden No. R-39/Pres/06/ 2016). B. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM RI.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	31 (tiga puluh satu)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Juli 2017
W a k t u	:	Pukul 10.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG) 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dalam RAPBN-P TA 2017, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	:	1. dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya. 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI beserta jajarannya. 4. Plh. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta jajarannya. 5. Sekretaris Kementerian BUMN RI beserta jajarannya. 6. Kepala BKPM RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan para Menteri Mitra Kerja Komisi VI DPR RI atau yang mewakili dan RDP dengan Kepala BKPM, dibuka pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari Selasa, 25 Juli 2017 dalam rangka Membahas Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dalam RAPBN-P TA 2017, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Ketua Rapat menyampaikan RAPBN-P TA 2017 Mitra Kerja Komisi VI DPR RI hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Menteri Mitra Kerja Komisi VI DPR RI atau yang mewakili dan Kepala BKPM, untuk menyampaikan tanggapan terkait RAPBN-P TA 2017 hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI tersebut.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan pendalaman dan memberi tanggapan terkait RAPBN-P TA 2017 Mitra Kerja Komisi VI DPR RI hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPR RI.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Menteri Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan Kepala BKPM, untuk memberikan jawaban atas pendalaman/tanggapan Anggota Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Badan Anggaran DPR RI untuk menetapkan Saldo Awal BLU Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp14.830.627.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sesuai hasil Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian hari Rabu, 12 Juli 2017 sebagai bahan akhir penetapan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Perindustrian RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017, dikenakan efisiensi Belanja Barang Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp227.057.792.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), ditambahkan Hibah Luar Negeri sebesar Rp541.945.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, serta ditambahkan Saldo Awal BLU sebesar Rp14.830.627.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sehingga anggaran Kementerian Perindustrian RI menjadi sebesar Rp2,616,201,779,000.00 (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Satu juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian BUMN RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, dikenakan efisiensi Belanja Barang Kementerian BUMN RI sebesar Rp45.000.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Rupiah*), sehingga anggaran Kementerian BUMN RI menjadi Rp198.865.072.000.00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal

21 Juli 2017, dikenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), sehingga anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadi Rp 960.773.348.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

5. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, dikenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp70.830.288.600,00 (*Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menjadi sebesar Rp453.739.151.400,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).
6. Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Perdagangan RI dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12556/DPR RI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, dikenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp166.207.393.300,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*), sehingga anggaran Kementerian Perdagangan RI menjadi Rp3.274.366.047.700,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB.